

**PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG  
JAMINAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN KOTA KEDIRI  
LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 2**

<b>ABSTRAK</b>	:	-	Bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur; Bahwa masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, maka perlu adanya tanggungjawab bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat.
			<p>Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan Umum</li> <li>- Asas, Maksud, Tujuan Dan Prinsip</li> <li>- PPK Rujukan</li> <li>- Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin</li> <li>- Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin</li> <li>- PPK bagi Masyarakat Miskin</li> <li>- Syarat dan Tata Cara Untuk Memperoleh Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin</li> <li>- Syarat Mendapatkan SKTM</li> <li>- Tata Cara Penerbitan SKTM</li> <li>- Masa Berlaku SKTM</li> <li>- Tim Verifikasi</li> <li>- Tata Cara Pengajuan Klaim</li> <li>- Pengawasan</li> <li>- Pembiayaan</li> <li>- Ketentuan Lain-Lain</li> <li>- Ketentuan Peralihan</li> <li>- Ketentuan Penutup</li> </ul>
<b>DASAR HUKUM</b>	:	-	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

	<p>daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:903/MENKES/PRM/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:686/MENKES/SK/II/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan</p>
--	--

		Kesehatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri; Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri.
<b>STATUS</b>	:	- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
		- Diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013.
<b>CATATAN</b>	:	- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan pemerintahan di daerah. Secara konseptual pelaksanaan pemerintahan di daerah di bidang kesehatan juga dilakukan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Tugas dan kewenangan provinsi di bidang kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e, “penanganan bidang kesehatan”. Tugas yang sama juga dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e “penanganan bidang kesehatan”. Terhadap urusan bidang kesehatan ini, dinyatakan bahwa baik bagi pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota hal itu sebagai urusan wajib. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kedua tingkat pemerintahan tersebut tidak mampu menyelenggarakan urusan kesehatannya dengan baik.